

**KRITISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN
KEWENANGAN DESA TERHADAP PENYELENGGAAN
PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF POLITIK ISLAM**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Dalam Ilmu Syariah

Oleh

Achmad David Z.A

NPM : 1321020028

Jurusan : Siyasah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

2018 M

ABSTRAK

Undang-Undang Desa tidak hanya mengamanatkan pengaturan tentang keuangan desa, tetapi juga meliputi pengakuan terhadap kewenangan desa, kerja sama antar desa, penguatan lembaga kemasyarakatan desa, penetapan dan pemberdayaan desa adat, partisipasi masyarakat desa, dan lain-lainnya. Hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Di satu sisi dana desa menjadi berkah bagi desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun di sisi lain belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat

Lahirnya UU. No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan kenegaraan Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan arah yang benar bagi proses pembangunan di Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat desa. Desa sebagai entitas yang mempunyai sifat dan ciri khas dapat membangun desanya dengan modal kekuatan dan peluang yang dimiliki

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Konsep Pengelolaan Pemerintahan Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan apakah Kewenangan Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sudah sesuai dengan Politik Islam

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier baik manual maupun digital yang berkaitan dengan tema pembahasan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengelolaan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU. No. 6 Tahun 2014 mencakup perencanaan, pengorganisasian kelembagaan, penggunaan sumber-sumber daya dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa. Terdapat kesesuaian antara ketentuan UU. No. 6 Tahun 2014 dengan konsep Politik Islam mengenai konsep kewenangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dimana desa memiliki empat kewenangan yang meliputi: pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Tlp. (0721) 703278

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Kritisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Perspektif Politik Islam**

Nama Mahasiswa : **Achmad David Z.A**

NPM : **1321020028**


Program Studi : **Siyasah**

Fakultas : **Syariah**

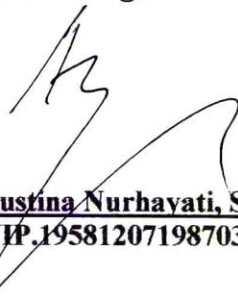
MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Pembimbing I


Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
NIP. 197005022000032001

Pembimbing II


Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.
NIP. 19581207198703002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah**


Drs. Susiadi AS, M.Sos. I
NIP. 19580817 199303 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Tlp. (0721) 703278

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kritisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Perspektif Politik Islam** disusun oleh **Achmad David Z.A NPM 1321020028**, jurusan **Siyasah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah pada hari/ tanggal : Jum'at, 29 Juni 2018

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si.

Sekretaris : Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy.

Penguji I : Drs. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H



DEKAN

Muhammad Syah, S.Ag., M.Ag
197009011997031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An Nisa : 59).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, (CV Atlas, Jakarta, 1998), h. 120

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Yang tersayang Ayahanda Zawawi dan yang tercinta ibunda Dani Setianingsih yang telah memberikan kasih sayang pengorbanan dan doa tulus serta kekuatan moral maupun spiritual selama ini.
2. Adik Winda Hasdita Z.A yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi untuk terus belajar meraih kesuksesan
3. Sahabat terdekat sekaligus guru memberikan dukungan dan bantuan serta cada tawanya dan perjuangan yang di lewati bersama dan terimakasih telah mengajarku ilmu-ilmu Agama selama ini.
4. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugrahi nama oleh kedua orang tua yaitu Achmad David Z.A dilahirkan di Pulung Kencana, 08 Agustus 1995 anak ke-1(dua) dari 2 (dua) bersaudara pasangan dari bapak Zawawi dan Ibu Dian Setianingsih

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan :

1. SDN 1 Pulung Kencana, 2007
2. SMPN 4 Pulung Kencana, 2010
3. SMAN I Tumijajar, 2013

Dengan mengucapkan alhamdulillah dan puji syukur atas nikmat Allah SWT serta berkat dan dorongan para keluarga, ayah dan ibunda tercinta, penulis mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Bandar Lampung Fakultas Syariah Jurusan Siyasah pada Tahun 2013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamiiiiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir, yang telah membawa manusia dari kehidupan yang gelap gulita sampai ke kehidupan yang penuh cahaya petunjuk seperti sekarang ini, yang selalu kita tunggu syafa'atnya nanti di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah pekerjaan yang mudah, akan tetapi perjuangan pikiran yang amat keras hingga menuntut keseriusan, ketelitian, pemerasan fikir, pengorbanan baik secara materil maupun immateril serta waktu yang panjang. Hal ini tak akan pernah terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun spiritual.

Atas segala bantuan dan peran sertanya yang telah diberikan kepada penulis, maka penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan para mahasiswanya.
2. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I dan Frenki M.Si selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Moh Mukri, M.Ag dan Ibu Agustina Nurhayati, M. Ag selaku pembimbing yang dengan tulus ikhlas dan meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberi petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
5. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.
7. Semua guruku.
8. Teman-teman seperjuangan selama kuliah di Jinayah Siyasah angkatan tahun 2013 yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih dan doa semoga amal baik mereka semua dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Bandar Lampung, 07 Mei 2018

Achmad David Z.A
NPM : 1321020028

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	5
C. Latar Belakang Masalah	6
D. Rumusan Masalah	17
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
F. Metode Penelitian	19
 BAB II WEWENANG PEMERINTAHAN DESA UNDANG UNDANG NO 6 TENTANG PEMERINTAHAN DESA	
A. Pengertian dan Konsep Pemerintahan Desa	26
B. Pengertian Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa	36
C. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	41
D. Struktur Pemerintahan Desa	44

BAB III PEMERINTAHAN DESA DAN

KEWENANGANNYA PRESPEKTIF POLITIK

ISLAM

A. Pengertian Politik Islam	56
B. Konsep Pemerintahan Desa Menurut Ketatanegaraan Islam	62
C. Fungsi Pemerintahan Desa Dalam Pandangan Politik Islam	74
D. Tujuan Pemerintahan Desa Dalam Pandangan Politik Islam	85

BAB IV ANALISIS DATA

A. Konsep Pengelolaan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa	91
B. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah di atur oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa bila dilihat dari prespektif politik Islam	107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu akan diuraikan dan dijelaskan istilah-istilah dari judul skripsi ini. Adapun judul yang dibahas adalah **“Kritisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Politik Islam”**.

Kritisasi dapat diartikan sebagai masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki pemerintahan.²

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah dan juga berorientasi kepada tindakan, sehingga dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan.³

² Pater Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991), h. 742

³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.⁵

Undang-Undang adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.⁶

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

⁴Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Jakarta: Sinar Grafika, t.t), h. 2

⁵ Marsono, *Himpunan Peraturan tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 69

⁶ Jumadi, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 33

Politik Islam *Al siyasah* berasal dari kata *ساس يسوس سياسة* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara*'.

Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn 'Aqil menyatakan *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya.⁸

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaifaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya

B. Alasan Memilih Judul

Alasan yang mendorong adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

⁷Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Jakarta: Sinar Grafika, t.t), h. 2

⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 28.

- a. Masalah kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah suatu masalah yang aktual diperbincangkan dan dikaji bahkan di perdebatkan
- b. Masih banyak desa yang belum paham akan wewenang desa dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kritisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Politik Islam

2. Alasan Subyektif

- a. terhadap Permasalahan tersebut belum ada yang membahasnya dan ingin mengetahui wewenang desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan prespektif politik Islam
- b. Ingin mengetahui lebih dalam tentang wewenang desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan prespektif politik Islam

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki amanat serta martabat yang tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Seperti halnya desa di mana desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Oleh karena itu, dalam sebuah desa perlu dibentuk yang

namanya peraturan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya.⁹

Pasal 69 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa regulasi di Desa meliputi: Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.¹⁰

Lahirnya UU. No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan kenegaraan Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan arah yang benar bagi proses pembangunan di Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat desa. Desa sebagai entitas yang mempunyai sifat dan ciri khas dapat membangun desanya dengan modal kekuatan dan peluang yang dimiliki.

Amanat undang-undang tentang desa ini semakin kuat karena menjadi cita-cita mulia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan.¹¹ Pasal 1 angka 12 tentang Ketentuan Umum, disebutkan:

“Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

⁹ Wahjudin Supeno, *Perencanaan Desa Terpadu*, Cet II, (Banda Aceh, Read, 2011), h. 1

¹⁰ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Cet I (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 23

¹¹ Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa* (Cet. I; Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 10

asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”.

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan kewenangan desa. Pemerintahan desa memiliki kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam konstruksi Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan lokal skala desa. Dengan demikian desa dapat mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.¹²

Dalam pelaksanaannya, beberapa desa telah menjalankan program kerjanya sesuai dengan ketentuan UU. No. 6 Tahun 2014 seperti dengan mengadakan pos pelayanan terpadu secara rutin, mengadakan perbaikan jalan, melakukan pembuatan saluran irigasi, penataan pasar dan lain sebagainya. Meskipun demikian, namun jika dilihat pada kenyataannya masih ada program kerja yang belum menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari berbagai kewenangan desa tersebut ternyata belum seluruhnya efektif dijalankan seperti tidak adanya pembinaan bagi masyarakat desa dalam hal kegiatan

¹² Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Cet. I, (Yogyakarta: Infest, 2016), h.2

ekstrakurikuler, serta kurangnya sosialisasi Kepala Desa terhadap masyarakat sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan sampai saat ini, karena masih kurangnya pemahaman masyarakat yang berada di sebuah desa dalam hal tersebut.

Oleh karena itu, setiap orang Islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan segala tindakannya tanpa didasari kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Dengan demikian, keadilan harus diwujudkan oleh setiap pemimpin apa saja dan di mana saja. Seorang Raja misalnya, harus berusaha untuk berbuat seadil-adilnya dan sebijaksana mungkin sesuai dengan perintah Allah SWT. dalam memimpin rakyatnya sehingga rakyatnya hidup sejahtera. Sebaliknya, apabila Raja berlaku semena-mena, selalu bertindak sesuai kemauannya, bukan didasarkan peraturan yang ada, rakyat akan sengsara. Dengan kata lain, pemimpin harus menciptakan keharmonisan antara dirinya dengan rakyatnya sehingga ada timbal balik di antara keduanya.¹³

Ilmusiyasah syar'iyah atau yang biasa disebut dengan ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.¹⁴

¹³ Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis : Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000 M), h. 134-135

¹⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga : Jakarta), 2008, h. 10

Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syariah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan

Fiqh siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al-Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, persamaan.¹⁵

¹⁵Mujar Ibnu Syarif, Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam (Bandung: Angkasa : Bandung) 2003, h. 11

Konsep negara dan pemerintahan merupakan suatu ijtihad yang merefleksikan adanya penjelajahan pemikiran spekulatif rasional dalam rangka mencari landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara serta pemerintahan sebagai sebuah faktor instrumental bagi pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun batin. Selain itu, perlu ditambahkan pula bahwa lahirnya ijtihad spekulatif tersebut didorong oleh suatu keinginan untuk mendapatkan landasan dalam rangka mempertahankan tatanan politik yang ada.¹⁶

Politik dan agama Islam sangat erat hubungannya. Bahkan tidak bisa dipisahkan satu dari keduanya. Konsep politik Islam selalu berlandaskan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Bukan hanya politik saja, melainkan seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Islam. Jadi, sangat tidak mungkin jika konsep politik Islam justru terlepas dari Islam. Namun dalam perjalanan sejarah perpolitikan dan pemerintahan Islam, sebagai contoh proses pemilihan maupun pemberhentian kepala negara, tidak ada yang baku dalam proses keduanya itu.

Pemikiran politik spekulatif yang ditujukan untuk memenuhi pemenuhan hajat asasi warga negara maupun yang ditujukan untuk memberikan legitimasi terhadap penguasa atau tatanan politik yang ada, dapat dilihat dalam pentas pemikiran politik Islam sepanjang masa, yang mana setiap ajaran politik yang lahir dalam rangka memenuhi dua maksud tersebut berusaha untuk mencari landasan otoritatif dari al-Qur'an dan sunnah serta praktik-praktik kenegaraan yang sudah ada sejak zaman sahabat.

¹⁶M. Din Syamsudin, *"Usaha Pendirian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam"*, dalam *Ulum al-Qur'an*, Nomor 2, Vol IV, (Jakarta, LSAF: 1993), h. 13

Konsekuensi dari adanya persoalan tersebut, maka setiap konsepsi politik Islam yang lahir, tokoh pencetusnya berusaha untuk menyandarkan ajaran yang dibawanya terhadap kedua sumber asasi dalam Islam itu, di samping juga berusaha untuk mengaitkan idenya dengan pelaksanaan yang bersifat praktis pada masa khulafaur rosyidin (Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali). Akibatnya, setiap konsepsi politik yang didasarkan kepada hal-hal itu dengan sendirinya sudah dianggap sebagai konsepsi politik Islam, di mana dalam perjalanan lebih lanjut, umat Islam dituntut untuk mengakui dan menjalankan ajaran itu sebagai sebuah bagian yang sangat integral dari hasil-hasil ijtihad politik yang lahir pada masa pertengahan atau pada masa sebelum kejatuhan Bani Abbas.

Abu Hamid al-Gazali dalam suatu karyanya yang berjudul *Al Iqtisad fi Al I'tiqad* menegaskan bahwa antara kekuasaan politik dan agama mempunyai saling ketergantungan yang sangat erat. Sehubungan dengan persoalan ini, al-Gazali menulis sebagai berikut:

“Agama merupakan dasar, dan sultan adalah penjaga-nya...sesungguhnya kekuasaan (sultan) itu hukumnya merupakan keniscayaan (*daruri*) ketertiban dunia dan ketertiban dunia merupakan keniscayaan bagi ketertiban agama serta ketertiban agama merupakan keniscayaan bagi keberhasilan di akhirat. Hal itu merupakan tujuan yang sebenarnya dari para nabi. Oleh sebab itu, keharusan adanya imam merupakan salah satu bentuk keniscayaan agama yang tidak bisa diabaikan”.¹⁷

Sesuai dengan ungkapan al-Gazali tersebut, dapat dipahami bahwa antara kekuasaan politik dan agama mempunyai saling ketergantungan yang sangat erat, di mana terciptanya iklim yang kondusif bagi agama tergantung kepada adanya

¹⁷Abu Hamid Al Ghazali, *Al Iqtisad fi Al I'tiqad*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Islamiyah), 1988, h. 148-149.

stabilitas politik, karena sultan selaku pemegang kekuasaan politik merupakan penjaga agama, di mana dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agama merupakan dasar bagi semua.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kritisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Politik Islam”**.

D. Rumusan Masalah

Adapun masalah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep pengelolaan pemerintahan desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. ?
2. Bagaimanakah penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah di atur oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa bila dilihat dari prespektif politik Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah

¹⁸Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES), 1996, h. 28

- a. Ingin menganalisis konsep pengelolaan pemerintahan desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
- b. Ingin menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah diatur oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa bila dilihat dari perspektif politik Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara akademis

Sebagai suatu saran untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Politik Islam tentang kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa perspektif politik Islam

b. Secara Praktis

Manfaat secara praktis untuk penulis, pembaca, serta masyarakat adalah mengetahui Pemerintahan Desa perspektif politik Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku,

literatur dan menelaah dari berbagai macam teori pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah sesuatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis dan obyektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.

Sedangkan yang dimaksud analitis sendiri yaitu suatu proses yang mengatur aturan data, mengorganisasikannya kesemua pola, kategori dan satuan uraian dasar yang kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis kritis terhadap pemikiran objek tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian *library research* ini memiliki sumber data yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Sumber Hukum Primer adalah sumber data yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ini yaitu : Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Ranny Kaurur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung : Tarunna Grafika, 2009), h.38

b. Sumber Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku, skripsi, referensi terkait, makalah yang disajikan dalam seminar, jurnal atau majalah ilmiah, surat kabar serta pendapat para ahli (tokoh) dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi ini.

c. Sumber Hukum Tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan situs internet terkait dengan materi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat bahwa literatur yang bersumber dari Al-Qur'an, kitab hadis, ensiklopedia, buku-buku yang berkaitan dengan batasan dan sanksi tindak pidana makar dan sejenisnya maka pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku
- b. Membaca, mencatat dan mengutip sesuai dengan data yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan
- c. Membandingkan antara sumber yang satu dengan yang lain demi lengkapnya data yang dibutuhkan.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:²⁰

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*Coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, perundang-undangan, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B dan seterusnya).
- c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Setelah mengumpulkan data, penulis mengoreksi data dengan mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan/tanda berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur secara berurutan sehingga dapat menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.

5. Metode Analisa Data

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan dari perpustakaan maka penulis akan mengolah dan menganalisa data tersebut sehingga menjadi satu hasil pembahasan dan gambaran data. Cara atau metode yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah metode berfikir deduktif yaitu mengolah data yang didapat dari sumber hukum primer, sekunder maupun tersier dengan analisa deduktif yaitu analisa dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Selanjutnya menggunakan pendekatan normatif atau metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²¹ Kaitannya dalam analisa ini yaitu pendekatan yang menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Metode analisa yang digunakan terakhir yaitu metodedeskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk

²¹Soerjono Soekanto *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.



BAB II

WEWENANG PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

G. Pengertian dan Konsep Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.¹ Di samping itu, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.²²

Sementara dalam UU. No. 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Dengan demikian, kajian tentang desa dan segala problematika sosial, budaya, ekonomi dan berbagai perspektif lainnya, sudah banyak diulas oleh para ahli sosiologi, terutama bila dilihat dalam perspektif geografis dan karakteristik kehidupan masyarakatnya, oleh sebab itu secara sederhana dapat kita awali dengan suatu pemahaman bahwa sebenarnya desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara berbagai kelompok kegiatan manusia dengan lingkungannya secara lebih

²²W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 243

²³ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h. 3

formal desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana pendapat tokoh sosiologi yaitu Ferdinand Tonnies pengertian desa adalah tempat tinggal suatu masyarakat yang bersifat “*gemeinschaft*” yaitu saling terikat oleh perasaan dan persatuan yang masih erat.²⁴

Adapun pengertian Desa menurut para ahli antara lain :

- a. Menurut UU. No. 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam ikatan NKRI
- b. Sutardjo Kartohadikusuma menyatakan bahwa desa adalah sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat “pemerintahan sendiri”.
- c. Paul. H. Landis, desa adalah sebagai wilayah yang penduduknya kurang dari 2500 jiwa. Dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - 1) Mempunyai pengaruh hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa

²⁴ Abd. Rasyid Masri, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1.

- 2) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
- 3) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam, seperti iklim, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan bersifat agraris bersifat sembilan.
- d. Para ahli sosiologi, desa adalah sekelompok manusia yang hidup bermukim secara menetap dalam wilayah tertentu. Yang tidak selalu sama dengan wilayah administrasi setempat dan mencakup tanah pertanian yang kadang dikuasai secara bersama.
- e. Menurut UU No. 22 Tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
- f. Dalam kamus sosiologi desa mengandung kompleksitas yang saling berkaitan satu sama lain di antara unsur-unsurnya, yang sebenarnya Desa masih dianggap sebagai standar dan pemeliharaan kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti tolong menolong, persaudaraan, gotong royong, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat, kesenian, kehidupan moral dan lain-lain yang mempunyai ciri yang jelas.²⁵

2. Konsep Pemerintahan Desa

²⁵ Suriyani, *Sosiologi Pedesaan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 3-5

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa.²⁶

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta-harta, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta keputusan kepala

²⁶ Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 59.

desa. untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga, dan melakukan pinjaman desa. kemudian berdasarkan hak asal-usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya.²⁷

Pandangan tentang konsep desa masa depan yang sejahtera dan demokratis dewasa ini mulai bermunculan dan telah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat lokal yang kemudian menjadi sesuatu yang diimpikan oleh masyarakat desa sendiri. Konsep desa impian ini tentulah sarat dengan pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta masyarakat sipil yang masif, semarak dan partisipatif. Karena desa dilihat dari sudut pandang hukum dan politik, yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri.²⁸

Perkembangan dalam pembangunan masyarakat desa harus berupa metamorfosis sosial ekonomi dan budaya yang seimbang yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat desa. Suatu bentuk kemajuan yang masih bersifat materil belumlah mencerminkan perkembangan yang sebenarnya.

²⁷ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 92-93.

²⁸ Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 132.

Pertumbuhan haruslah selalu didampingi oleh sebuah hubungan antar manusia yang mengangkat kondisi sosial ekonomi masyarakat desa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pembangunan Desa yang lebih baik tentunya tidak terlepas dari sistem pemerintahan desa. Pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya melaksanakan pembangunan masyarakat, terutama pembangunan masyarakat dalam desa adat sebagai suatu bentuk keanekaragaman budaya di negeri ini.²⁹

Dengan demikian, untuk membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik.³⁰

Dalam konteks desa membangun, kewenangan lokal berskala Desa telah diatur melalui Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

²⁹ Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal*, Op. Cit, h. 150.

³⁰ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa, Cet. I* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 10.

- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.³¹

³¹ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa, Op. Cith.* 10-11.

H. Pengertian Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang. No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerintahan berasal dari kata dasar perintah yang mempunyai arti kata verbal atau bentuk dari kata kerja. Secara defenitif, pemerintah adalah: Sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.³²

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 756.

Sebagaimana pengertian di atas, maka organisasi Pemerintahan Desa meliputi Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peranan kelembagaan desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan berkaitan erat dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan. Pada era reformasi hal tersebut semakin menguat dibandingkan era orde baru. Perubahan ini sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan perubahan paradigma pembangunan dan pemerintahan abad 21, baik dalam lingkungan intra dan ekstra sosial.

Pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Otonomi daerah tersebut harus diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup perubahan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan good governance benar-benar tercapai.³³

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan dari segi tugas dan wewenang (fungsi). Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara ini demi tercapainya tujuan negara. Segala kegiatan yang yang

³³ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Op. Cit, h. 16.

terorganisasikan berarti kegiatan-kegiatan yang memenuhi syarat-syarat organisasi. Artinya, kelompok manusia yang mempunyai tujuan bersama, yang dapat dilakukan dengan bekerja sama. Lalu agar kerja sama itu berjalan dengan baik maka diadakan pembagian kerja di bawah satu pimpinan. Pengertian bersumber pada kedaulatan ialah bersumber pada pemegang kedaulatan dalam negara, misalnya rakyat yang memegang kedaulatan di Indonesia. Selanjutnya berlandaskan pada dasar negara berarti semua kegiatan pemerintahan dilandasi ideologi dan falsafah negara, misalnya Pancasila dan UUD 1945 di Indonesia. Mengenai rakyat berarti semua warga negara yang bersangkutan. Tentang wilayah berarti seluruh wilayah negara yang bersangkutan yang mencakup darat, laut, dan udara sesuai dengan batas-batas yang diakui dunia internasional. Akhirnya, tujuan negara berarti kegiatan pemerintahan diarahkan untuk mencapai tujuan masyarakat negara yang disepakati bersama, umpamanya Indonesia mempunyai empat tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Lalu ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Menurut ketiga batasan di atas dapatlah disimpulkan pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan

tugas dan kewenangan negara (fungsi negara). Yang melaksanakan tugas dan kewenangan negara ialah pemerintah.³⁴

I. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Secara garis besar penjelasan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :³⁵

1. Kepastian hukum adalah asas di dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

³⁴ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cet. I (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 168.

³⁵ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Op. Cit, h. 11-12.

4. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.
9. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
10. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
11. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok dan masyarakat tertentu.

12. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang megikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa

J. Struktur Pemerintahan Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun yang dimaksud Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Desa Pasal 1 ayat 6 yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas asas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Adapun pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka harus memenuhi syarat pembentukan desa yaitu : ³⁶

³⁶ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 91. 18

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Bagian wilayah kerja
- d. Perangkat
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 jo. Pasal 25 dinyatakan bahwa “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintahan, di mana Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”³⁷

Otonomi desa dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa sebagai perwujudan demokrasi. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan lainnya. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut :³⁸

- a. Kepala Desa Kepala Desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU. RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa (UU. RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1)

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, h. 14

³⁸ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 168

Kewajiban Kepala Desa menurut UU. RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- 6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- 7) Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- 9) Mengelola Keuangan dan Aset Desa
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa

- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU. RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa).

Fungsi BPD yang berkaitan dengan Kepala Desa yaitu (UU. RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah :

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

c. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah :

- 1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa

- 2) Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa
- 3) Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa
- 4) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin
- 5) Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

d. Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun (Kadus) adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun adalah :

- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- 2) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- 4) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- 5) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat
- 6) Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
- 7) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

e. Pelaksana Teknis Desa

1) Kepala Urusan Pemerintah.

Tugas Kaur Pemerintah adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Sedangkan fungsinya adalah :

- (a) Melaksanakan administrasi kependudukan
- (b) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa
- (c) Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
- (d) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
- (e) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (f) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
- (g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

2) Kepala Urusan Pembangunan (Kaur. Pembangunan)

Tugas Kaur Pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat

serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Sedangkan fungsinya adalah :

- (a) Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- (b) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
- (c) Mengelola tugas pembantuan.
- (d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Kaur Kesejahteraan Rakyat adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah :

- (a) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
- (b) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
- (c) Menyiapkan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- (d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

4) Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kaur Keuangan adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah :

- (a) Mengelola administrasi keuangan desa.
- (b) Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa
- (c) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

5) Kepala Urusan Umum

Tugas Kaur Umum adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah

- (a) Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- (b) Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- (c) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- (d) Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- (e) Mengelola administrasi perangkat desa.
- (f) Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
- (g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

BAB III

PEMERINTAHAN DESA DAN KEWENANGANNYA PRESPEKTIF POLITIK ISLAM

K. Pengertian Politik Islam

Kata politik sebenarnya berasal dari kata Yunani, yaitu *Polis* yang berarti kota yang berdaulat, seperti Athena, Sparta, dan Korihthus sebagai lawan daerah yang takluk dan wajib membayar pajak kepadanya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *politic* yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent* (bijaksana). Kata politic itu terambil dari kata Latin *politicus* dan bahasa Yunani (Greek) *politicos* yang berarti *relating to citizen*, yang kesemua itu merujuk pada kata Polis.³⁹

Secara terminologis, kata politik pertama kali dikenal dari buku Plato yang berjudul Politeia, yang dikenal juga dengan Republik. Berikutnya muncul karya Aristoteles yang berjudul politia. Kedua karya itu dipandang sebagai pangkal pemikiran yang berkembang kemudian. Dari karya tersebut dapat diketahui bahwa istilah politik merupakan kata yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat. sebab yang dibahas dalam kedua buku itu merupakan soal-soal yang

³⁹Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 34.

berkaitan dengan masalah bagaimanapun pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik.⁴⁰

Dalam kamus-kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata siyasah. Kata ini terambil dari kata sasa-yasusu yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur dan sebagainya. Dalam al Qur'an tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata sasa yasusu, namun hal itu bukan berarti bahwa al Qur'an tidak menguraikan persoalan politik. Uraian al Qur'an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukm. Kata ini pada mulanya berarti menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan.

Dari akar kata yang sama terbentuk kata hikmah yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata sasa-yasusu-sais-siyasat yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali dan cara pengendalian. Kata siyasat sebagaimana dikemukakan di atas diartikan dengan politik dan juga sebagaimana terbaca sama dengan hikmat.⁴¹

Yusuf al Qardlawi menjelaskan bahwa politik dalam kosa kata Arab adalah al siyasah, merupakan masdar dari kata sasa yasusu, dan pelakunya adalah sa'is. Istilah ini menekankan aspek kepemimpinan. Politik Islam menurut Yusuf al Qardlawi disebut dengan istilah al siyasah al syar'iyah. Sebab makna al syar'iyah dalam konteks ini adalah yang menjadi pangkal tolak dan sumber bagi

⁴⁰ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran al Ghazali Dan Ibnu Taimiyyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), h. 40

⁴¹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 416- 417

al siyasah (politik) dan menjadikannya sebagai tujuan bagi siyasah. Pengertian ini berkaitan dengan pandangan ulama terdahulu yang mengartikan politik pada dua makna. Pertama, makna umum, yaitu mengenai urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka berdasarkan syari'at agama. Kedua, makna khusus, yaitu pendapat yang dinyatakan pemimpin, hukum dan ketetapan-ketetapan yang dikelurakannya untuk menangkai kerusakan atau memecahkan masalah khusus, yang terbatas dalam lingkup pemerintahan dan negara tertentu.⁴²

Bahasa politik Islam mempunyai dua fungsi, yaitu penafsiran terhadap nilai-nilai Islam dan pengarahan terhadap cita-cita sosial Islam. Dalam hal ini terdapat hubungan antara doktrin dan konsepsi. Bahasa politik berfungsi sebagai instrumen untuk merumuskan konsepsi yang merupakan terjemahan dari doktrin. perpaduan antara doktrin-doktrin dan cita-cita sosial (konsepsi) sangat mungkin terjadi terutama jika doktrin-doktrin tersebut dipahami secara komprehensif sebagai suatu keseluruhan.

Secara teoritis pengertian Islam politik meliputi dimensi ajaran Islam yang terkait dengan kegiatan politik (hubungan manusia dengan kekuasaan yang diilhami petunjuk Islam) yang telah bersinggungan dengan berbagai kepentingan manusia.⁴³

Islam politik terkait dengan teori, praktek, Landasan, nilai-nilai Islam dalam berpolitik. Kajian terhadap Islam Politik merupakan upaya mempelajari

⁴² Yusuf Qardlawi, *Pedomena Bernegara dalam Perspektif Islam*, (terj), (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1999), h. 38.

⁴³ M. Din Syamsudin, *Religion and politik in Islam, the case of Muhammadiyah in Indonesia New Orde*. Disertasi Universiti of California, (Los Angelfes, 1991), h. 34-30

perilaku politik seseorang, kelompok, atau umat Islam yang didorong kesadaran keagamaan yang tinggi.⁴⁴

Dalam konteks syari'ah hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah disebut 'siyasah' dari konsep siyasah ini kemudian lahir gagasan-gagasan yang dikenal sebagai Islam politik di dalam tradisi ilmu-ilmu keislaman, kaitan relasional antara pemerintah dan rakyat menjadi bahan kajian dari disiplin siyasah syar'iyah, atau politik yang berbasis syar'i.⁴⁵

Disiplin ini bukanlah hal yang baru dalam Islam secara empiris studi tersebut sudahlah dimulai sejak risalah ke Nabi-an dan telah mengalami kodifikasi secara luas seiring suksesi politik pasca Nabi Saw dengan perihal semacam ini, kemudian Islam dipandang sebagai hal yang tidak bisa dipisahkan dari politik (Negara) bahkan Schatt, seperti dikutip Yusuf Musa.⁴⁶

Mengingat Islam bukan sekedar sebagai Agama ia juga menyebabkan hukum dan politik. Sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada politik kecuali bersendikan syara'. Ibnu Taimiyah sendiri menandakan bahwa Islam pada dasarnya menghendaki berdirinya sebuah tata politik yang kuat untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.⁴⁷

Perkataan politik telah mengalami pasang naik dan pasang surut dalam kehidupan bernegara di tanah air kita, malah sebelum kita bernegara di abad kedua puluh ini, yaitu ketika belanda masih mencengkram kukunya di Indonesia,

⁴⁴ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 23

⁴⁵ Abdul Azis, *Politik Islam dan Politik*, (Yogyakarta: Tiara wacana, 2006), h. 18

⁴⁶ Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, (Surabaya: Al Ihlal, 1990), h. 26

⁴⁷ Qomruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, (Bandung : Pustaka 1973), h. 4

istilah politik sudah menimbulkan pengertian yang beragam bagi pihak-pihak yang mempergunakan atau memperkatakannya. Bagi seorang ahli atau peserta pergerakan kebangsaan ini umpamanya. Politik dianggap sebagai semacam kelezatan, dan ahli-ahli pun semua mengharapkan agar siapapun yang menyebutkan dirinya bangsa Indonesia turut terjun ke dalam kancah perjuangan politik itu. Sehingga para pemimpin-pemimpin perjuangan kita mengatakan Jangan takut politik, jangan buta politik, jangan berdiam diri dengan keadaan politik yang dihadapi.⁴⁸

L. Konsep Pemerintahan Desa Menurut Ketatanegaraan Islam

Pandangan ketatanegaraan di Indonesia memiliki hirarki struktural pemerintahan yang diatur secara tertulis dalam Undang-Undang. Misalnya tentang hirarki terendah pelaksana pemerintahan, yaitu desa. Desa merupakan bagian terendah dari pelaksana pemerintahan di Indonesia. Desa secara tertulis diakui (status) dan memiliki otoritas kebijakan (hak otonomi baku) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 bahwa “Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

⁴⁸ Delier Noer, *Pengantar Pemikiran Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 1

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁴⁹.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang definisi dan fungsi pemerintahan desa. Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (desa tersebut) dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, desa merupakan bagian dari pelaksana pemerintahan yang memiliki hak otoritas, kedaulatan dan administratif desa. Desa menurut Undang-Undang desa adalah “pelaksana tugas pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa dan/atau disebut dengan istilah yang lain”. Melihat amanah perundang-undangan tersebut, pemerintah desa merupakan suatu kesatuan pelaksana pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kedaulatan desa.

Adapun yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintahan pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-Peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, h. 2.

Sejak Tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 Pemerintahan Desa di Indonesia diatur oleh perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah Belanda. Sebenarnya pada tahun 1965 tentang Desapraja yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda yang disebut *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB). Tetapi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 yang menyatakan tidak berlaku lagi dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dalam prakteknya tidak berlaku walaupun secara yuridis undang-undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang baru mengatur Pemerintahan Desa.⁵⁰

Oleh karena itu, dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵¹

⁵⁰HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 11.

⁵¹ Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Cet. I (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 9

Pada tingkat Desa/Kelurahan, Kepemimpinan pemerintahan dijalankan oleh Kepala Desa/Lurah. Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) adalah Pemerintah Desa, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-kepala Dusun. Sedangkan dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu Sekretariat Desa sebagai unsur staf, yang terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.⁵²

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam suatu pemerintahan diperlukan sebuah konsep yang ideal agar pemerintahan tersebut dapat berdiri kokoh dan dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang diinginkan. Dengan adanya konsep yang ideal, maka pemerintahan yang dipimpin oleh seorang *Ulil Amri* (Pemegang Kekuasaan) yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut guna terciptanya kondisi

⁵² S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 108.

masyarakat yang sehat baik secara moral maupun fisik serta sejahtera agar hal tersebut sesuai dengan konsep pemerintahan menurut ketatanegaraan Islam.

Adapun konsep pemerintahan menurut ketatanegaraan Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam nash al-Quran, yang artinya “Bahwa pemerintahan menurut ketatanegaraan Islam berdasarkan kepada tiga aturan penting yaitu taat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, taat kepada yang memegang kekuasaan diantara semua umat dan mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa”. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa: 59 yang berbunyi:

سُوْلَ اللّٰهِ اِلٰى فِرْدُوْهُ شَيْءٍ فِى تَنْزِعَتُمْ اِنْ مِنْكُمْ اِلَّا مَرْوُا۟ اِلٰى الرَّسُوْلِ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ اَطِيعُوا۟ اَمْرًاۙ الَّذِيْنَ يَنْۢأَمُّ بِهَا
تَا۟وِيْلًا وَّاَحْسَنُ حَيْثُ دَلَّكَ الْاٰخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللّٰهِ تُوْمِنُوْنَ كُنْتُمْ اِنْ وَّالَر

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An Nisa : 59)⁵³

Perihal ketentuan pemerintahan dalam syariat yang berupa nash, tidak menjelaskan seluruh permasalahan secara terperinci. Akan tetapi yang disebutkan merupakan pokok-pokok ataupun kerangka sebagai pondasi dasar dan aturan yang jelas. Dalam hal terperinci tersebut dilakukanlah proses ijtihad yang tidak keluar dalam kerangka syariat. Hal ini menunjukkan keluasan hukum syariat yang

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf Cet. I (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 87

mampu untuk diterapkan dalam setiap masa. Mengapa demikian, karena permasalahan politik dan negara adalah permasalahan yang selalu berkembang dari masa ke masa bahkan setiap hari persoalan baru dalam pemerintahan bisa selalu muncul.

Ayat yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa taat terhadap Allah, Rasul-Nya dan para pemimpin merupakan suatu kewajiban, hanya saja substansi ketaatan itu sendiri berbeda. Bagi yang taat kepada Rasul-Nya tentu saja ia telah taat kepada Allah. Tetapi, bagi yang taat kepada pemimpinnya belum tentu ia taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Alasannya, para pemimpin mungkin saja memberlakukan sistem politik yang negatif, sementara masyarakat tetap mengikutinya, karena alasan bermacam-macam. Apakah karena ingin mendapat posisi atau mendapat imbalan berupa jabatan dan sebagainya. Uraian tersebut menunjukkan bahwa taat kepada Allah dan Rasul-Nya berdimensi ganda.

Ia merupakan indikator keimanan seseorang, faktor intuitif yang memungkinkan seseorang mendapat pengetahuan limpahan, faktor kesatuan dan persatuan, bahkan juga faktor ketertiban sosial. Di samping itu, ketaatan terhadap pemimpin mengandung makna adanya kesadaran atau (bahkan) keterpaksaan. Kesadaran, karena produk-produk yang dibuatnya berdasarkan alQur'an dan hadis, sedangkan keterpaksaan karena tidak sesuai dengan al-Qur'an dan hadis. Yang jelas, perlunya untuk menaati para pemimpin, karena mereka memiliki

kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan sistem perpolitikan dalam masyarakat.⁵⁴

Dari ayat tersebut di atas, pemerintahan yang ideal selalu bisa beradaptasi dalam menyesuaikan setiap permasalahan tanpa mengganggu konstitusi serta tatanan kenegaraan. Oleh karena itu, hal tersebut bisa dikatakan pemerintahan menurut ketatanegaraan Islam sebab selalu memperhatikan kondisi aktual dan mampu menerapkan kebijakannya selaras dengan perkembangan zaman. Sehubungan dengan hal tersebut.

Abdul Muin Salim mengatakan “Pemerintahan sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut “wali” atau “amir” atau dengan istilah lainnya yang dikenal dalam perpustakaan politik dan ketatanegaraan Islam.”⁵⁵

Sayyid Quthb yang menyatakan bahwa Pemerintahan Islam tidak harus dibentuk atas suatu sistem atau pola tertentu, Pemerintahan Islam dapat menganut sistem mana pun asalkan melaksanakan syariat Islam. Semua pemerintahan yang melaksanakan syariat Islam dapat disebut sebagai Pemerintahan Islam apa pun bentuk dan corak pemerintahan itu. Sebaliknya, bagi Sayyid Quthb, pemerintahan yang tidak mengakui (syariat) Islam, meskipun dilaksanakan oleh organisasi yang

⁵⁴ Muh. Abduh Wahid, *Etika Politik dalam Perspektif Hadis* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 26

⁵⁵ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Cet. III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 294.

menamakan dirinya Islam atau mempergunakan label Islam, tetap tidak dapat dikatakan Pemerintahan Islam.⁵⁶

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan yang baik terutama menyangkut tentang urusan duniawi (dunia) maupun urusan ukhrawi (akhirat). Hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah Agama yang komprehensif yang di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu terdapat dalam QS Ali Imran : 118 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا اِلٰهَآءَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ
تَعْقِلُوْنَ كُنْتُمْ اِنْ اِلَّا يَتْلُوْكُمْ بَيْنًا قَدْ اَكْبَرُ صُدُوْرُهُمْ تُخْفِيْ وَمَا اَفُوْهُ

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh Telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. (QS Ali Imran : 118)⁵⁷

Dalam ayat di atas terkandung larangan keras untuk simpati dan memihak kepada orang-orang kafir, karena yang dimaksud biṭṭhonah dalam ayat tersebut adalah orang-orang dekat yang mengetahui berbagai hal yang bersifat rahasia.

⁵⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. V (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 151.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Transliterasi Az-Zukhruf*, h. 65.

Bithonah diambil dari kata-kata bathnun yang merupakan kebalikan dari zhahir yang berarti yang nampak. Sedangkan Imam Bukhari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bithonah adalah orang-orang yang sering menemui karena sudah akrab. Kata Ibnu Hajar, penjelasan tersebut merupakan pendapat Abu Ubaidah.

M. Fungsi Pemerintahan Desa Dalam Pandangan Politik Islam

Wewenang pemerintahan desa yaitu mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya, dan mendamaikan perkara dari para warganya. Pemerintahan desa berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan desa. Fungsi pemerintahan adalah memimpin, memberi petunjuk, memerintah, mengarahkan, koordinasi, pengawasan dan inovasi dalam pemerintahan.⁵⁸

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Tugas dan kewajiban kepala desa dalam

⁵⁸ Muklis Hamdi, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 22.

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan peraturan pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Dalam hal ini tidak terlepas oleh peran pemerintah desa itu sendiri. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Nucholis, Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok:⁵⁹

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten.

Dari tugas pokok tersebut lahir fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat.⁶⁰

Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut :⁶¹

1. Fungsi Instruktif. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Fungsi Konsultatif. Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah.

Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan

⁵⁹ Hanif Nucholis, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 138

⁶⁰ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 53.

⁶¹ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan yang Efektif* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 74

yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinnya.

3. Fungsi Partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.
4. Fungsi Delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.
5. Fungsi Pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan

Untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi pemerintah desa tersebut maka perlu dan harus melakukan komunikasi dengan masyarakat supaya mereka mengerti tentang ide pembangunan sehingga dapat dan mau berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang akan dan sedang dilakukan.

Dalam sistem kenegaraan Islam, pentingnya eksistensi suatu pemerintahan dianggap sama dengan wajibnya eksistensi negara itu sendiri. A. Hasjmy dengan mengutip pendapat Abdul Kadir Audah mengatakan bahwa: Adapun fungsi

Pemerintahan dalam Islam, yaitu menegakkan perintah Allah. Dengan kata lain menegakkan Islam sendiri, di mana al-Qurʿān telah menugaskan kepada pemerintahan Islam supaya memusnahkan syirik dan menguatkan Islam, mendirikan sembahyang dan mengambil zakat, menyuruh maʿruf dan melarang yang mungkar, mengurus kepentingan-kepentingan manusia dalam batas hukum-hukum Allah.⁶²

Bagi A. Hasjmy pemerintah dapat berfungsi secara ideal menurut ajaran-ajaran Islam serta bertujuan untuk melindungi, mengayomi dan mempersatukan rakyat serta memperlakukan secara adil tanpa mengurangi hak-haknya. Lebih penting pemerintahan berfungsi untuk melindungi kebebasan rakyat dalam melaksanakan ajaran-ajaran Agama-Nya sesuai keyakinan masing-masing. Peranan seperti ini menjadi suatu realitas sejarah yang pernah dilakukan Nabi dan Khulafa al-Rasyidin pada masa pemerintahannya. Di samping itu, ada yang berpendapat bahwa pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.⁶³

Oleh karena itu, fungsi pemerintahan yang harus dijalankan menurut A. Hasjmy didasarkan atas keadilan, ketaatan rakyat dan musyawarah. Ketiga dasar ini merupakan politik Islam di bidang pemerintahan. Implementasinya di Negara Madinah telah menjadi tolak-ukur sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk kehidupan bernegara pada masa kini, konsep keadilan tidak

⁶² Abdul Kadir Audah yang Dikutip Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam: Studi Pemikiran A. Hasjmy* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 115.

⁶³ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 75.

hanya menjadi sentral dalam budaya negara modern, tapi justru menjadi dambaan masyarakat. Oleh sebab itu, politik Islam dalam praktiknya masih harus diperjuangkan. Dengan demikian, implementasi keadilan merupakan hal penting yang harus diwujudkan dalam kenyataan. Hal ini mengingat keadilan adalah nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial. Nilai adil merupakan orientasi dalam interaksi antarmanusia. Jika keadilan dilanggar, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup.⁶⁴

Al-Qur'an memerintahkan agar hukum-hukum syariat yang terkandung di dalamnya ditegakkan dalam kehidupan manusia sebagai tertib individu dan sosial. Perintah tersebut berimplikasi pemberian wewenang kepada manusia untuk menata kehidupannya dengan menerapkan hukum Allah tersebut. Dan dari sini diperoleh pengertian bahwa hakikat kekuasaan politik adalah kewenangan (otoritas) untuk menyelenggarakan tertib masyarakat berdasarkan hukum Allah. Kekuasaan tersebut bersumber dari Allah dan dilimpahkan melalui firman-Nya (al-Qur'an) kepada orang-orang yang beriman. Penyelenggaraan tertib masyarakat berdasarkan hukum Allah itulah yang merupakan perwujudan dari kekuasaan politik tersebut, atau dapat juga diungkapkan bahwa wujud kekuasaan politik tersebut adalah sebuah sistem politik yang diselenggarakan berdasarkan dan menurut hukum Allah yang terkandung dalam al-Qur'an.⁶⁵

Konsepsi kenegaraan A. Hasjmy menunjukkan bahwa eksistensi negara dalam Islam bukanlah merupakan eksistensi kebutuhan sosial semata, melainkan

⁶⁴ A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 7.

⁶⁵ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, h. 285.

dibangun sebagai proses alamiah yang tumbuh bersama dengan peradaban umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dengan munculnya proses kenegaraan dalam Islam tidak terlepas dari aktualisasi potensi akal yang diberikan oleh Allah untuk menata kehidupan secara lebih baik dan sesuai fitrah sosial yang dikaruniakan Tuhan dengan memosisikan manusia dalam sebuah komunitas berbangsa dan bernegara. Di sisi A. Hasjmy melihat adanya pertautan yang erat sekali antara agama dan negara. Menurutnya Islam tidak memberi tempat bagi sekularisme, sebuah paham yang mengembangkan kehidupan politik tanpa dasar-dasar moral keagamaan sebagai sumber etik bernegara.

Secara fungsional tugas terpenting negara di masa yang akan datang adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera, melalui peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, negara harus mampu mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan seraya melakukan penataan ulang terhadap berbagai sektor yang mendukung terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia. Berbagai sektor yang dimaksud antara lain; sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan, infrastruktur, penguatan demokrasi, desentralisasi, dan lain-lain.⁶⁶

Menurut Al-Gazali, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan

⁶⁶ Abd. Rasyid Masri, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan*, h. 145

Agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.⁶⁷

N. Tujuan Pemerintahan Desa Dalam Pandangan Politik Islam

Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi yang terendah di bawah camat dan memiliki hak penyelenggaraan rumah tangga sendiri. Di samping itu, adapun yang dimaksud Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Desa Pasal 1 ayat 6 yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.⁶⁸

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan, dan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

⁶⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, t.t.), h. 260.

⁶⁸ Y. W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah* (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 187.

Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang menjadikan Islam sebagai agamanya dan dibangun atas dasar syariat Islam atau dalam perkataan lain syariat merupakan “undang-undang tertinggi atau undang-undang dasar, yang mencakup berbagai cabang hukum, baik yang berkenaan dengan pidana, ekonomi, kemasyarakatan, maupun urusan perorangan.”⁶⁹

Adapun menurut penilaian Sayyid Quthb, pemerintahan Islam bercorak manusiawi, terutama dengan konsepsinya yang kuat tentang kesatuan manusia serta tujuannya yang menghendaki agar seluruh umat manusia terhimpun di bawah bendera persaudaraan atau persamaan.⁷⁰

Di samping pengertian di atas, Muhammad Yusuf Musa memberikan penegasan bahwa tujuan pemerintahan yang Islami memiliki multisasaran dengan garis-garis besarnya sebagai berikut :⁷¹

1. Memberikan penjelasan keagamaan yang benar dan menghilangkan keraguraguan terhadap hakikat Islam kepada seluruh manusia, mengajak manusia kepada Islam dengan kasih sayang, melindungi dari tindakan golongan anti Agama dan agresor serta dari seseorang yang ingin melanggar hukum-hukum-Nya.
2. Mengupayakan dengan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan

⁶⁹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Cet. V; Jakarta: UI-Press, 1993), h. 152

⁷⁰*Ibid*, h. 149

⁷¹ Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam: Studi Pemikiran A. Hasjmy* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 123

yang baik bagi setiap warga umat sehingga seluruhnya dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh yang satu terikat dengan yang lainnya.

3. Melindungi tanah air dari setiap agresi dan seluruh warga negara dari kezaliman, kedurhakaan dan tirani. Memperlakukan mereka seluruhnya sama dalam memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara pemimpin dan rakyatnya, antara yang kuat dan yang lemah, terhadap lawan dan kawan

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu etika dalam sebuah pemerintahan. Etika pemerintahan merupakan prinsip-prinsip moral yang baik dan buruk yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dianggap sebagai pedoman yang dapat mengantarkan pemerintah untuk bertindak secara baik, guna menyejahterakan masyarakat. Etika diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah, agar pemerintah tersebut bertindak secara benar sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dibentuknya pemerintahan dalam suatu Negara memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menjaga sistem ketertiban yang memungkinkan masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara wajar. Keberadaan pemerintah diperlukan pada hakikatnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka secara baik, tertib dan bertanggung jawab.

Pemerintahan yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan

dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (clean government), adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan prinsip di atas, pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang maksimal. Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika produktivitas bersinergi, dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya.⁷²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

⁷² A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Cet. III; Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 160.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Konsep Pengelolaan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Desa tidak hanya mengamanatkan pengaturan tentang keuangan desa, tetapi juga meliputi pengakuan terhadap kewenangan desa, kerja sama antar desa, penguatan lembaga kemasyarakatan desa, penetapan dan pemberdayaan desa adat, partisipasi masyarakat desa, dan lain-lainnya.

Hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Di satu sisi dana desa menjadi berkah bagi desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun di sisi lain belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat.

Akibat itu semua, dana desa terkesan menimbulkan ketergantungan baru karena belum digunakan untuk kegiatan yang dapat menopang perekonomian masyarakat setempat serta meningkatkan pendapatan asli desa. Dan yang lebih parah lagi adalah penggunaan dana desa masih melakukan replikasi atas "village project" sebelumnya yang bisa pembangunan infrastruktur.

Demokratisasi desa masih menghadapi kendala praktek serba administratif. Aparatus pemerintah daerah cenderung melakukan tindakan kepatuhan dari Pusat untuk mengendalikan pemerintah desa, termasuk dalam hal

penggunaan dana desa. Padahal Undang-Undang Desa telah mengakui kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya secara demokratis dan partisipatif.

Di sisi lain, demokratisasi desa juga masih terkendala oleh lemahnya tingkat partisipasi yang substantif dan konstruktif dari masyarakat desa. Pada dimensi inilah pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya berperan aktif untuk membina dan memberdayakan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi mereka

Proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berhadapan dengan realitas masyarakat perdesaan yang didominasi oleh masyarakat miskin yang salah satu penyebabnya karena struktur penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria yang timpang. Masalah penguasaan rakyat atas tanah dan sumber daya alam belum terintegrasi dan menjadi basis dari proses pembangunan dan pemberdayaan desa.

Masalah-masalah struktural seperti konflik agraria, kepastian hak desa atas wilayahnya dan kedaulatan dalam mengatur ruang desa belum tercermin dalam kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa.

Partisipasi perempuan dalam musyawarah desa belum tersebar luas. Praktik pelaksanaan Musyawarah Desa cenderung patriarki, peran perempuan mengalami marginalisasi ketika mereka menyampaikan usulan yang berkaitan dengan kepentingan tubuh, nalar, dan keberlangsungan hidupnya.

Kompleksitas masalah dan tantangan itu mengharuskan pemerintah segera berbenah diri dan mengambil tindakan konkrit untuk menyelesaikannya. Dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi nasional guna menyatukan berbagai aspirasi pihak yang ikut mengimplementasikan Undang-Undang Desa

Dalam Pasal 1 Angka 1 UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara rinci dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan terbitnya UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai pondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas utama yang menjadi ruh UU ini.

UU Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar

terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebelum UU Desa tersebut ditetapkan, sejak Indonesia merdeka, telah ditetapkan pula beberapa Undang-Undang yang secara eksklusif maupun mandiri mengatur tentang desa. Undang-Undang itu antara lain: UU. No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU. No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU. No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, UU. No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UU. No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir (hingga sebelum 15 Januari 2014) adalah UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang menyangkut Desa mulai dari Pasal 200 s/d Pasal 216.

Dengan demikian, wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*).

Sebagaimana dijelaskan dalam UU. No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 dan 3 bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan perangkatnya bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa guna peningkatan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki desa. Dengan demikian, adapun pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan pemerintahan, penggunaan sumber-sumber daya, pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan dan urusan pemerintahan umum, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa.

Pemerintah desa juga menjalankan tugas-tugas rutin pemerintahan ditingkat desa, yaitu pelayanan administrasi masyarakat desa (surat pengantar KTP, surat keterangan tidak mampu dan surat lainnya). Kewenangan tersebut harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara umum pengelolaan pemerintahan desa mencakup beberapa aspek sebagai berikut, antara lain :

1. Perencanaan pemerintahan desa.

Pemerintah desa harus merencanakan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga pemerintahan, pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa). Setelah memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa, selanjutnya pemerintah desa menyusun perencanaan anggaran (RAPB Desa)

2. Pengorganisasian kelembagaan pemerintahan desa.

Pemerintah desa melakukan pengorganisasian kelembagaan yang ada di desa, mengatur pola hubungan dengan pemerintah desa dengan tujuan menjadi mitra dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pelibatan peran-peran kelembagaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa mutlak diperlukan. Peranan kelembagaan desa (pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa) dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan berkaitan erat dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan. Pada era reformasi hal tersebut semakin menguat dibandingkan era orde baru. Perubahan ini sejalan tuntutan dan kebutuhan perubahan paradigma pembangunan dari “membangun desa” ke “desa membangun”.

3. Penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan desa.

Sumber-sumber daya pemerintahan desa (sumber daya aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan peralatan).

Dalam konteks ini, pemerintah desa mengelola sumber-sumber daya yang ada di desa termasuk sumber daya aparatur pemerintah desa. pembagian tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintahan yang optimal. Selain itu, pengorganisasian sumber daya, asset dan potensi yang ada di desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi permusyawaratan masyarakat harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Musyawarah desa sebagai instrumen pengambilan keputusan bersama di tingkat desa harus dijalankan untuk menciptakan suasana kehidupan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif

Berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Dalam menjalankan otonomi desanya, pemerintah desa dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing desa.

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dengan demikian, dalam UU. No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 menjelaskan bahwa :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d. Menetapkan Peraturan Desa
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif

- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan

- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan jender
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Berdasarkan Pasal 27 UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota

- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Di antaranya adalah bahwa Kepala Desa berwenang untuk :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Telah Di Atur Oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa bila Dilihat dari Prespektif Politik Islam

Kajian teoretis ataupun perspektif praktis perbincangan tentang makna wewenang kekuasaan politik dalam semua sisinya tetap menjadi wacana aktual yang tak berkesudahan. Hal ini disebabkan, karena keberadaannya secara fungsional identik dengan keberadaan masyarakat itu sendiri. Selain itu, konsep

wewenang terhadap kekuasaan politik belumlah sepenuhnya menjadi kesepakatan semua orang. Bahkan masih banyak kalangan umum yang menganggap kekuasaan politik sebagai sesuatu yang jelek dan harus dihindari, kekuasaan politik disinonimkan dengan tipu daya muslihat dan kelicikan.

Sebagai wacana dan upaya mendudukan istilah kekuasaan politik, pengkajian terhadap istilah ini dalam perspektif Islam sangat diperlukan, terutama dalam kerangka penemuan konsep-konsep kekuasaan politik dalam perspektif Al-Qur'an.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya

(58) Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

(59) Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An Nisa : 58-59)

Kedua ayat di tersebut dinilai oleh para ulama sebagai prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran Islam tentang kekuasaan dalam pengertian

tanggung jawab terhadap amanahnya serta kekuasaan Allah. Hal ini menandakan bahwa semua aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Allah SWT melalui konstitusi yang ada di dalam Al-Qur'an, ini menandakan adanya syumuliatul Islam.

Amanat dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk.

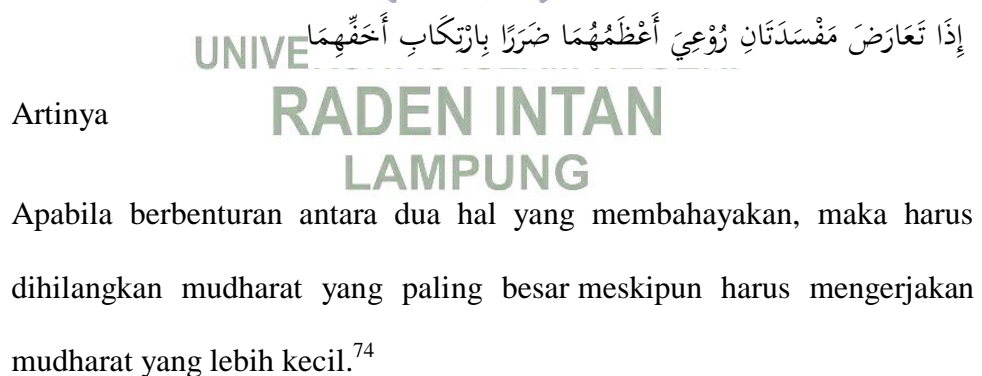
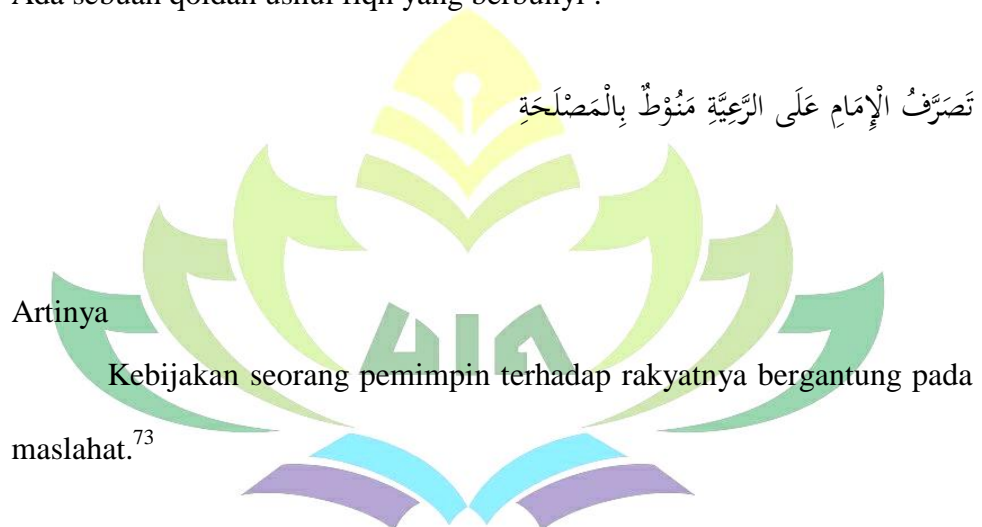
Dalam konsepsi Islam, manusia memikul amanah (amanah ibadah dan amanah risalah). Amanah ini boleh jadi sebagai konsekuensi dari deklarasi universal yang pernah dinyatakan manusia di hadapan Allah dan sekaligus menjadi tantangan terhadap sifat manusia yang etis yang harus dibuktikan melalui keberhasilannya di dalam menunaikan amanah yang telah disanggupinya itu.

Hal ini dapat dipahami bahwa amanah yang diberikan kepada manusia harus dipertanggungjawabkan bukan saja kepada manusia tetapi juga di hadapan Allah swt. Amanah risalah berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai khalifatullah fi Al-Ardh. Kedudukan itu mencakup aktivitas manusia dalam memakmurkan dan memelihara bumi, menata kehidupan dan menyejahterakan umat manusia. Aktivitas ini jelas-jelas merupakan suatu tindakan dan fungsi siyasah manusia yang otentik.

Oleh sebab itu, amanah risalah dalam pengertiannya yang luas menegaskan bahwa manusia adalah makhluk siyasah yang bertanggungjawab atas

terpeliharanya keteraturan hidup di tengah-tengah masyarakat manusia dan lingkungan hidupnya, sedangkan siyasah memakmurkan bumi dalam islam memiliki tujuan antara dan sekaligus menjadi cara, jalan dan sarana untuk meraih tujuan yang lebih mulia dan lebih abadi, yaitu keselamatan kehidupan yang lebih bermakna dan kekal, kehidupan akherat.

Ada sebuah qoidah ushul fiqh yang berbunyi :



Lebih jauh dari sekedar pengetahuan retorik tersebut, maka ada pengertian yang lebih luas adalah segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan mekanisme

⁷³ As Sayuti, *Al Asbah Wanadhoir Fil Furu'* (Surabaya, Indonesia : Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nubhan wa Auladuh, t.t), h. 62

⁷⁴ *Ibid*, h. 184

musyawarah. Hal ini sebagai terjemahan dari pernyataan kaidah tersebut yang menekankan pada aspek kemaslahatan, karena metode musyawarah adalah salah satu bentuk yang riil untuk mencapai dan mendapatkan suatu kemaslahatan untuk bersama.

Qaidah ini berarti bahwa, benar dan tidaknya kebijakan pemerintah dalam pandangan syari'at Islam bergantung pada maslahat atau tidaknya kebijakan itu pada rakyat, jika maslahat benar bagi rakyat maka benar, dan jika tidak maslahat maka tidak benar. Kebijakan itu dikaitkan dengan kemaslahatan, karena pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil dari rakyat.

Imam yang dimaksud di atas bukan hanya pemimpin tertinggi seperti khalifah dan presiden, tapi mencakup semua orang yang memiliki otoritas, misalnya gubernur, bupati, anggota DPR, dan perangkat Desa. Mereka semua adalah pemegang amanat dari rakyat, maka harus bekerja demi kemaslahatan rakyat.

Kemaslahatan dalam bahasa Indonesia berarti dengan kebaikan, kemanfaatan dan kepentingan. Ulama ushul fiqh membagi kemaslahatan ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. *Mashlahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diapresiasi dan diperhatikan oleh syari'(pembuat syari'at, Allah swt.). Bukti bahwa suatu kemaslahatan itu diapresiasi dan diperhatikan syari' adalah adanya ketentuan hukum syar'i di dalam Al-qur'an dan/ al-Sunnah yang berorientasi mewujudkan kemaslahatan dimaksud, seperti diwajibkannya

shalat lima waktu, dianjurkannya shalat-shalat sunnah, diharamkannya perzinahan, pencurian, dan miras.

2. *Mashlahah Mulghah*, yakni kemaslahatan yang diabaikan dan tidak dipergunakan oleh *syari'*. Bukti bahwa suatu kemaslahatan diabaikan oleh *syari'* ialah adanya aturan *syar'i* di dalam Al-qur'an dan/ al-Sunnah yang bertolak belakang dengan apa yang dianggap maslahat itu. Dengan kata lain, *mashlahah mulghah* adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan *syari'*at, seperti berpakaian rok mini—yang menurut sebagian orang perempuan dianggap sebagai kemaslahatan estetis— bertentangan dengan aturan *syari'*at yang mewajibkan perempuan menutup seluruh tubuhnya, selain wajah dan telapak tangan.
3. *Mashlahah Mursalah*, yakni kemaslahatan yang lepas dari sorotan dalil, dalam arti tidak ada dalil yang secara langsung dan spesifik dijadikan dasar bahwa *mashlahah* dimaksud diperhatikan atau diabaikan, seperti dikumpulkannya Al-qur'an dalam satu *mushaf*, pengadaan rumah sakit dan lembaga kemasyarakatan, pemberian gaji yang cukup, dan sebagainya.

Kemaslahatan yang harus dijadikan pijakan pemimpin dalam membuat kebijakan adalah *mashlahah mu'tabarah* dan *mashlahah mursalah*, sedangkan *mashlahah mulghah* tidak boleh dijadikan pijakan karena telah dikesampingkan oleh *syari'*. Kebijakan pemimpin di sini menyangkut dua hal pokok yang memang menjadi tugas pokok pemimpin sebagai pelanjut misi kenabian, yakni menjaga Agama dan mengatur dunia. Akan tetapi, berhubung *syari'* tidak banyak menangani langsung persoalan teknis, maka persoalan *siyasah* (kebijakan politik)

lebih banyak mengacu kepada *mashlahah mursalah* dari pada *mashlahah mu'tabarah*. Maka, yang penting bagi pemimpin ialah bagaimana kebijakannya tidak bertabrakan dengan aturan syari'at, meski tidak jelas-jelas diambil dari sumber hukum *syar'i*



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penulisan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Konsep pengelolaan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU. No. 6 Tahun 2014 mencakup perencanaan pemerintahan desa; pengorganisasian kelembagaan pemerintahan desa; penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan desa seperti sumber daya aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan peralatan; dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa
2. Terdapat kesesuaian antara ketentuan UU. No. 6 Tahun 2014 dengan konsep ketatanegaraan Islam mengenai konsep kewenangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dimana desa memiliki empat kewenangan yang meliputi: pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang melahirkan perspektif bahwa desa adalah entitas atau kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat).

B. Saran

1. Diharapkan setiap pemerintah desa dapat lebih memperhatikan pengelolaan pemerintahan desa sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam UU. No. 6 Tahun 2014.
2. Diharapkan pemerintah desa dan masyarakat dapat bersinergi serta memanfaatkan Anggaran Alokasi Dana Desa dengan mempertimbangkan kepentingan orang banyak untuk kepentingan pribadi.
3. Perlunya perbaikan serta pengadaan sarana dan pra sarana seperti kantor desa, kendaraan operasional, jaringan internet yang stabil, fasilitas desa yang memadai, dan perlunya sosialisasi kepala desa agar masyarakat lebih paham terhadap pemerintahan desa itu sendiri sebagaimana tugas kepala desa dalam UU. No. 6 Tahun 2014.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Al Ghazali, 1988, *Al Iqtisad fi Al I'tiqad*, Dar Al Kutub Al Islamiyah, Beirut
- Abd. Rasyid Masri, 2014, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan*, Cet. I, Alauddin University Press, Makassar
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmad Syafi'i Maarif, 1996, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta
- As Sayuti, t.t, *Al Asbah Wanadhoir Fil Furu'*, Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nubhan wa Auladuh, Surabaya
- A Djazuli, 2007, *Fiqh Siyasah*, Kencana, Jakarta
- Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung
- HAW. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- _____, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jumadi, 2017, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan* Cet. I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Joko Purnomo, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Cet. I, Infest, Yogyakarta
- Marsono, 1999, *Himpunan Peraturan tentang Pemerintahan Daerah*, Djambatan, Jakarta
- M Silahuddin, 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Cet I, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta
- Moch Musoffa Ihsan, 2015, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Cet. I, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta
- M Din Syamsudin, 1993, *Usaha Pendirian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam dalam Ulum al-Qur'an*, Nomor 2, Vol IV, LSAF, Jakarta

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, 2008, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Jakarta

Pater Salim dan Yeni Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

Ranny Kaurur, 2009, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Tarunna Grafika, Bandung

Rachmat Syafe'i, 2000, *Al-Hadis : Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, Pustaka Setia, Bandung

Risma Handayani, 2014, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Cet. I, Alauddin University Press, Makassar

Rozali Abdullah, 2010, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Cet. III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Syahrir Karim, 2012, *Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal*, Cet. I, Alauddin University Press, Makassar

Suriyani, 2013, *Sosiologi Pedesaan*, Cet. I, Alauddin University Press, Makassar

Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Taliziduhu Ndraha, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sinar Grafika, Jakarta

W. J. S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Wahjudin Supeno, 2011, *Perencanaan Desa Terpadu*, Cet II, Read, Banda Aceh

Wahyudin Kessa, 2015, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Cet. I, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta

Ramlan Subakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Cet. I, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta